

**DOKUMEN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(R K P D)  
KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
(BAPPEDALITBANG)  
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan

agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;



**Tabel 5.1. Matrik Rencana Program Prioritas Per Urusan  
Kabupaten Balangan Tahun 2023**

No (1)	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				36.186.320.400	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				34.186.320.400	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				34.186.320.400	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah		100 %	6.155.187.400	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat paritispasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar		86,45 %	27.141.943.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum yang sesuai peraturan		100 %	118.690.000	APBD
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang s1 (PAUD, SD dan SMP)		75,36 % 80,39 % 97,04 %	709.270.000	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mandiri		100 %	61.230.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				2.000.000.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				2.000.000.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan		23,53 %	14.500.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		62,5 %	1.026.337.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek		100 %		
		Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)		0,35 Nilai		
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika				11.761.158.800	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				11.514.658.800	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				11.514.658.800	APBD
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		100 %	5.072.836.480	APBD
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18 %	3.941.056.652	APBD
		Presentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		20 %		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemeruintah		80 %	2.500.765.668	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				220.100.000	APBD
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		70 %	220.100.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				26.400.000	APBD
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah		100 %	26.400.000	APBD
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan				8.810.967.387	APBD